

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Batas Wilayah Negara

Indonesia berbatasan darat Internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, PNG, dan Timor Leste. Perbatasan darat tersebut tersebar di tiga pulau (Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara), serta empat provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur). Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan kedaulatan dengan 10 negara tetangga yaitu Malaysia, PNG, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. Perbatasan darat antara Indonesia dan PNG memiliki panjang 820 km membentang dari Skouw, letak Kota Jayapura berada di sebelah utara sampai muara sungai *Bensbach*, dan Merauke berada di sebelah Selatan. Garis batas ini melintasi 5 (lima) kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Kerom, Merauke, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, dan Kota Jayapura.¹¹

Delimitasi batas RI dengan PNG di Pulau Papua mengacu kepada perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea tanggal 12 Februari 1973, yang diratifikasi dengan UU No. 6 tahun 1973, serta deklarasi bersama Indonesia dan

¹¹ World Bank, *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014*, DSF Indonesia, 2011, <<http://documents1.worldbank.org/curated/es/871851468042279485/pdf/682610WPOP11840rder0Areas0201102014.pdf>> diakses tanggal 12 oktober 2020.

PNG tahun 1989-1994. Koordinat dan lokasi pilar batas darat dengan negara PNG tersebar dalam 52 titik pilar batas yang telah disepakati dalam perjanjian RI – PNG 12 Februari 1973. Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas RI-PNG sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana hingga saat ini jumlah tugu utama atau dengan kata lain *Meridian Monument* (MM) yang tersedia berjumlah 55 buah, sedangkan tugu perapatan berjumlah 1792 buah.¹² Berikut gambar 2.1 menunjukkan gerbang perbatasan negara Indonesia dan Papua New Guinea :

Gambar 2.1

Gerbang Perbatasan Negara Indonesia dan Papua New Guinea



Sumber Gambar : Laporan Audiensi Perbatasan oleh Bea Cukai pada Agustus 2016

Gerbang perbatasan sebagai penghubung interaksi warga negara tetangga PNG dengan warga negara Indonesia. Kegiatan ekonomi pun terjadi di kawasan perbatasan tersebut, yang mana pada hari selasa, Kamis dan Sabtu telah ditentukan sebagai hari pasar bagi warga negara PNG yang berjualan di wilayah perbatasan, pengunjung yang datang berwisata pun sangat beragam, mulai dari wisatawan lokal hingga asing. Ketika berkunjung ke perbatasan khususnya ketika memasuki wilayah PNG, pengunjung akan disuguhkan dengan souvenir-souvenir produk

¹² Ibid., halaman. 3-4.

lokal PNG serta pengunjung dapat mencoba kuliner khas PNG. Tentu hal ini memberikan kesan bagi pengunjung asal Indonesia jika perbatasan RI-PNG merupakan objek wisata.

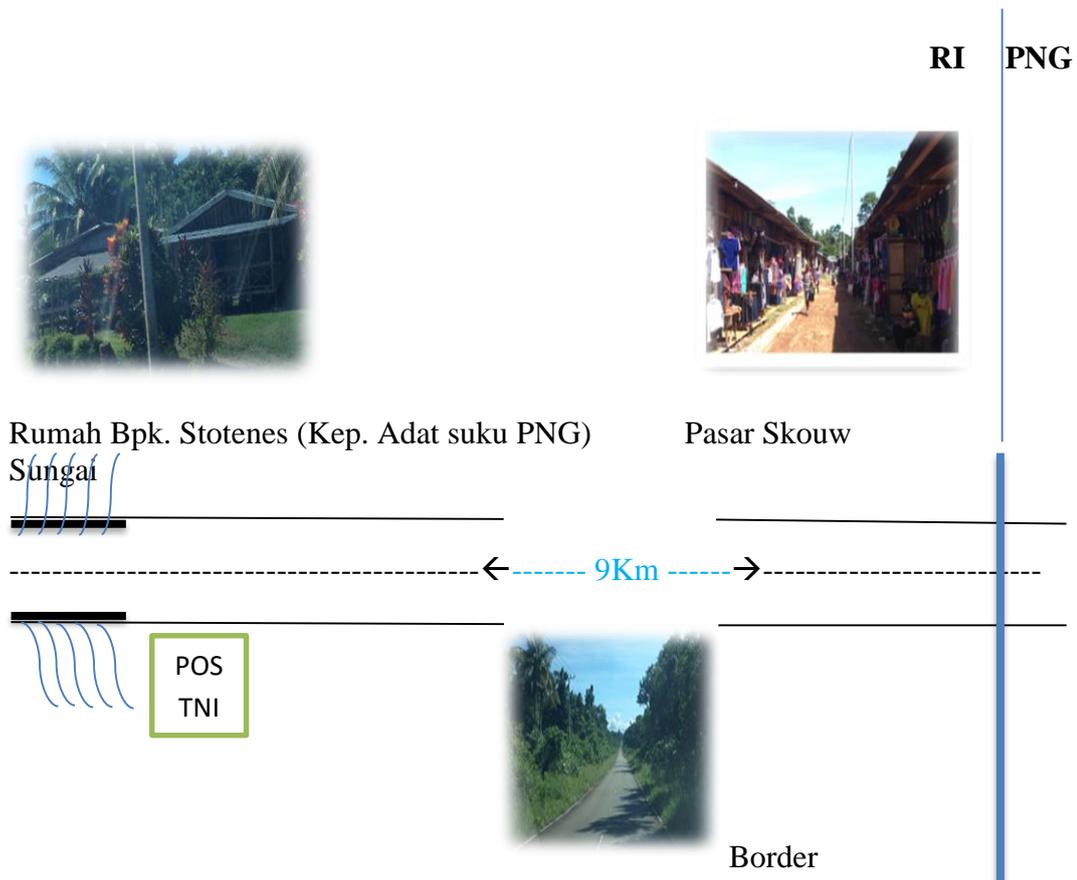
Pengunjung asal PNG cenderung datang ke Indonesia untuk berbelanja pada pasar tradisional yang terletak tidak jauh dari gerbang perbatasan. Karena akses yang jauh menuju pusat kota, warga negara PNG lebih tertarik untuk berbelanja di pasar tradisional Skouw yang terjangkau dari segi jarak dan harganya. Tidak hanya melintasi batas untuk berbelanja, sebagian warga negara PNG, melintasi batas negara untuk berkebun atau mengunjungi saudaranya. Hal ini terjadi akibat hak atas tanah adat dimana perbatasan Indonesia dan PNG secara adat dipisah sungai, namun PBB menetapkan perbatasan RI – PNG berjarak 9 km dari sungai tersebut di dalam wilayah adat suku PNG. Sehingga para petugas RI dianggap menumpang di wilayah adat PNG, setiap hari ada warga PNG yang melintas untuk mengunjungi saudara mereka atau berkebun di wilayah RI dengan membawa senjata tajam.¹³

Pada gambar 2.2, peneliti memberikan ilustrasi dinamika wilayah adat suku PNG di perbatasan RI-PNG:

¹³Kepala KPPBC TMP C Jayapura, *Bea Cukai Berdamai Dengan Keterbatasan Di Perbatasan (Power Point)*, Direktorat Jendral Bea Cukai, 2016, Slide 24.

Gambar 2.2

Ilustrasi Dinamika Wilayah Adat Suku PNG di Perbatasan RI-PNG



Sumber Gambar : Laporan Audiensi Perbatasan oleh Bea Cukai pada Agustus 2016

Hak atas tanah adat inilah yang kemudian membuat warga negara PNG dapat bermukim dan memiliki kebun yang di olah pada wilayah admistrasi Indonesia. Hak atas tanah adat warga negara PNG tidak dapat dibatasi, namun ketertiban tetap dijaga agar tidak menimbulkan hal-hal yang ilegal terjadi dikawasan perbatasan. Bagi masyarakat asli Wutung (PNG), mereka hanya menggunakan *tradisional card* (kartu kuning), kartu tersebut menjadi tanda pengenalan bagi warga PNG yang hendak melintas untuk berbelanja di pasar Skouw

atau melintas untuk berkebun dan berkunjung di rumah keluarganya. Karena masyarakat wutung merupakan masyarakat yang berada di desa/kampung yang berbatasan dengan wilayah Republik Indonesia, yang berarti mereka tinggal di wilayah perbatasan. Jika warga negara PNG yang bukan berasal dari desa/kampung wutung, mereka memerlukan passport/visa sebagai dokumen keimigrasian.

Saat ini pengelolaan batas Negara RI-PNG ditangani dua lembaga yaitu *Joint Border Committee (JBC)* RI-PNG yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub Komisi Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas RIPNG yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan. Lalu mengenai kerjasama perbatasan kedua negara, setiap tahunnya Pemerintah RI-PNG membahas pada forum *Border Liaison Officer Meeting (BLOM)*, *Border Liaison Meeting (BLM)*, *Joint Border Committee* dan *Joint Ministerial Committee (JMC)*.

Di Kota Jayapura, Provinsi Papua, instansi yang diberikan wewenang melalui pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kerjasama perbatasan dan luar negeri adalah Badan Perbatasan Dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN). Sedangkan melalui pemerintah pusat (nasional), dalam bidang pengelolaan dan administrasi perbatasan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pos Lintas Batas Negara (PLBN). PLBN ini merupakan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan pembangunan PLBN hingga tahun 2021, sesuai dengan amanat nawacita yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun silam, yaitu “Membangun dari Pinggiran”. Tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan perbatasan negara

yang sering juga disebut sebagai halaman belakangnya Negara Indonesia, menjadi beranda depan yang dapat dibanggakan.

2.2 Profil Kampung Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura

Secara geografis, Distrik Muara Tami terletak pada 10 , 281 211 - 30 , 581 8211 Lintang Selatan dan 1370 , 341 - 1410 , 01 Bujur Timur. Distrik Muara Tami berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea di Sebelah Timur, Distrik Abepura di sebelah Barat, Kabupaten Keerom di sebelah selatan, dan Samudera Pasifik di sebelah utara. Distrik Muara Tami terdiri dari 2 kelurahan dan 6 kampung dengan luas wilayah mencapai 626,7 km² yang merupakan distrik terluas di Kota Jayapura. Kelurahan yang terdapat di Distrik Muara Tami saat ini yaitu Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur, dan 6 kampung yaitu Kampung Holtekam, Skouw Yambe, Skouw Mabo, Skouw Sae, Koya Tengah, dan Kampung Mosso. Kelurahan/kampung dengan luas wilayah terbesar adalah Kelurahan Koya Barat yang mencapai 34, 63 persen dari luas wilayah Distrik Muara Tami yaitu sebesar 217 km². Sementara itu, Kelurahan/Kampung dengan luas wilayah terkecil adalah Kampung Holtekam dengan luas wilayah 13,3 km² atau sebesar 2,12 persen dari total luas wilayah Distrik Muara Tami. Sebagai informasi, Kelurahan definitif pertama yang diresmikan Walikota Jayapura pada tahun 2001 adalah Kelurahan Koya Timur dan Kelurahan Koya Barat dimana 2 kelurahan ini merupakan wilayah yang menjadi salah satu tujuan program

transmigrasi pemerintah pusat pada tahun 1983- 1984.¹⁴ Jarak kelurahan/kampung terdekat dari ibukota Kota Jayapura adalah Kampung Holtekam dengan jarak 29 km, sedangkan kelurahan/kampung terjauh dari ibukota Kota Jayapura adalah Kampung Mosso. Kampung mosso pun sebagai kampung terakhir dan menjadi batas negara Indonesia dan Papua New Guinea. Berikut gambar 2.2 menunjukkan titik batas kampung Mosso sebagai kampung terakhir yang menjadi pembatas negara Indonesia dan Papua New Guinea :

Gambar 2.2
Titik Batas Kampung Mosso



Sumber Gambar : Kantor Distrik Muara Tami, Kota Jayapura

Penduduk pada Distrik Muara Tami berjumlah 19.058 jiwa.¹⁵ Jumlah total RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) di Distrik Muara Tami tahun 2018 adalah 93 RT dan 30 RW. Kelurahan Koya Barat memiliki jumlah RT terbanyak yaitu sebanyak 36 RT dan kelurahan Koya Timur memiliki jumlah RW terbanyak yaitu sejumlah 12 RW. Sedangkan enam kampung lainnya terpecah menjadi dua sampai dengan sembilan RT dan satu sampai dengan tiga RW. Salah satu tujuan

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Distrik Muara Tami Dalam Angka(pdf)*, Kantor Badan Pusat Statistik Kota Jayapura, 2019, halaman 3.

¹⁵ Dinas Kependudukan Kota Jayapura, *Jumlah Penduduk Keseluruhan*, Dinas Kependudukan Kota Jayapura, 2020.

pembentukan RT dan RW adalah untuk mengontrol mobilisasi penduduk dan menertibkan administrasi kependudukan. Untuk itu, keberadaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) ditingkat kelurahan/kampung dan di tingkat distrik sangatlah diperlukan untuk memperlancar proses penertiban administrasi kependudukan. Jumlah keseluruhan PNS di Distrik Muara Tami adalah sejumlah 65 PNS yang tersebar di kantor-kantor kelurahan/kampung di Distrik Muara Tami. Berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS di Distrik Muara Tami mayoritas berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 40 orang dan 25 orang berpendidikan S1 keatas.¹⁶

Sebagai Distrik yang berbatasan darat dengan negara tetangga, PNG, khususnya kampung skouw hingga kampung mosso, banyak dinamika yang dialami masyarakat yang hidup di perbatasan, jangkauan perkotaan yang jauh memberihambatan diberbagai sektor. Masyarakat memiliki hak untuk mengelola tanah atau lahan sebagai pertanian dan perkebunan, tidak hanya sebagai usaha rakyat tetapi dapat dikonsumsi untuk keberlangsungan hidup. Komoditas unggulan daerah skouw dari hasil pertanian ; sayur-sayuran, ubi jalar, singkong, tomat, rica, jeruk asam dan jenis sayur lainnya. Sistem pertanian dan teknik bercocok tanam yang digunakan oleh masyarakat masih sederhana. Hasil pertanian lebih banyak untuk di konsumsi oleh masyarakat. Sedangkan dari hasil perkebunan ; pinang, kelapa dan kakao. Biasanya masyarakat menjual pinang dan kelapa kepada pembeli yang masuk ke kampung dan juga dijual oleh masyarakat di pasar. Terdapat pula tanaman buah-buahan seperti Mangga, Salak, Jengkol, Pete, Rambutan dan Semangka.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, op.cit., halaman.13.

Dalam persentase mata pencaharian masyarakat skouw menunjukkan bahwa 71,5% sebagai petani dan nelayan; 13,1% sebagai PNS; 9,2% sebagai pedagang; 1,5% sebagai TNI/POLRI; 4,6% pensiunan. Potensi hasil hutan yang terdapat di Kampung Skouw dan sering diambil oleh penduduk adalah Kayu, Rotan dan Sagu. Hasil hutan berupa sagu diolah untuk diambil tepung sagunya, selain itu juga dimanfaatkan daunnya untuk membuat atap sedangkan kayu di ambil oleh masyarakat untuk membuat rumah dan ada juga yang di ambil dalam bentuk balok dan papan untuk di jual. Rotan juga digunakan untuk pembuatan kursi dan Penahan dinding gabah pada dinding rumah. Potensi laut yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah dengan menangkap ikan dengan cara memancing ataupun dijaring. Hasil tangkapan selain untuk dikonsumsi sendiri, ada juga yang dijual namun dalam jumlah yang terbatas. Apabila sedang musim ombak, masyarakat akan mencari ikan di telaga di Kampung Skouw. Jenis ikan yang ada di telaga yaitu nila dan mujair. Jenis ternak yang diusahakan oleh masyarakat meliputi ayam, babi, dan sapi.

2.3 Potensi Pasar Skouw Bagi Masyarakat Adat (*Indigenous People*)

Pasar merupakan salah satu bagian dari berbagai macam sistem, prosedur, hubungan sosial dan juga infrastruktur yang berhubungan dengan penjual dan pembeli. Di dalam sistem pasar terdapat adanya kegiatan transaksi atau jual-beli suatu produk dan jasa. Pasar sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa

Indonesia) adalah orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli.¹⁷ Pasar berperan sangat penting bagi pergerakan roda perekonomian suatu negara. Di Indonesia, pasar yang mendominasi adalah pasar-pasar tradisional, karena pasar tradisional hadir di pelosok daerah hingga di kota-kota besar, dan menyediakan kebutuhan pokok yang dicari konsumen dan transaksi dilakukan secara langsung atau tatap muka, hal ini memberi peluang adanya tawar-menawar ketika terjadi proses jual beli.

Pada kawasan perbatasan RI-PNG, pemerintah menyediakan sarana-prasarana agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan tersebut dan terbukti keberadaan pasar tradisional di perbatasan dua negara tersebut mampu mencukupi kebutuhan masyarakat skouw serta menjadi manfaat bagi masyarakat yang ingin bergerak sebagai pengusaha untuk memulai usahanya pada pasar tradisional.

2.3.1 Sejarah Pasar

Pasar Skouw awalnya terbentuk dari *marketing point* pada tahun 2003. Para pedagang pun turut mengambil bagian pada lokasi *marketing point* di kawasan perbatasan RI PNG. Lokasi *marketing point* tersebut berada dalam ruang lingkup tanah milik Pemerintah Daerah. Namun tanah milik pemerintah daerah

¹⁷ L. Mahartika, 'Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya, Sebagai Roda Perekonomian Masyarakat', *Liputan 6*, 2019, <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3911445/jenis-jenis-pasar-beserta-contohnya-sebagai-roda-perekonomian-masyarakat>> diakses tanggal 15 Oktober 2020.

berdampingan dengan tanah milik Seorang Kepala Kampung Wutung bernama Stotenes, yang tinggal di sekitar perbatasan, karena melihat peluang usaha yang muncul dari aktivitas jual beli di *marketing point*, maka beliau pun membangun los-los kios miliknya untuk disewakan kepada pedagang.

Menimbang dampak positif dari hadirnya aktivitas jual beli di perbatasan, pemerintah daerah mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan agar membangun pasar percontohan pada kawasan perbatasan RI-PNG. Ketika disetujui, pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait adalah Dinas Perdagangan & Perindustrian Provinsi Papua yang mengelola pasar perbatasan hingga memberikan anggaran dana untuk perluasan tanah/lahan demi mempersiapkan pembangunan pasar skouw tersebut. Ketika Kementerian Perdagangan sepakat dalam membangun pasar percontohan tersebut, pembangunan terus berjalan hingga di tahun 2008. Saat itu tempat usaha/los sudah mencapai 100 los untuk pedagang dan tujuannya agar dapat dikelola oleh para pedagang dalam menunjang aktivitas mereka pada pasar. Di tahun 2015 Pasar Percontohan diresmikan oleh Menteri Perdagangan dan efektif di pakai pada tahun 2015-2017. Tidak lama setelah itu pasar mengalami kerusakan besar akibat kebakaran di tahun 2017. Aktivitas pasar terhambat dan mengalami penurunan efektifitas.

Sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu Dan Sarana Prasarana Penunjang Di Kawasan Perbatasan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua meminta agar pasar percontohan yang ada di Perbatasan RI-PNG dapat direfitalisasi pasar baru. Maka Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun Pasar tersebut berada dalam lingkungan PLBN yang dimana semua sarana prasarana tersebut berada dalam Zona Pendukung Kawasan Perbatasan RI-PNG.

Pasar diperkirakan akan diresmikan dan ditempati oleh pedagang pada pertengahan tahun 2020. Berikut gambar 2.3.1 menunjukkan potret Pasar Skouw sebelum direfitalisasi dan yang telah direfitalisasi menjadi Pasar Wisata Skouw :

Gambar 2.3.1
Pasar Skouw



Sebelum dan Sesudah Refitalisasi Pasar

Akan tetapi problematika global yang sedang terjadi yaitu pandemik covid19 memberikan hambatan bagi efektivitas pasar. Berdasarkan hasil riset, pasar baru yang telah direfitalisasi akan berubah nama menjadi **Pasar Wisata Skouw**. Berdasarkan wawancara peneliti bersama *Kepala Bid. Perdagangan Luar Negeri, Bpk Herman Bleskadit*, beliau mengatakan :

“Tahun ini di bulan Maret telah resmi diserahkan untuk Pemerintah Papua kelola. Tahapan pembagian kunci, yang pertama sudah 200 kunci los kita sudah serahkan, sisa 100 kunci los namun belum diserahkan karena situasi Pandemi Covid 19. Ada beberapa kami panitia tim yang dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri untuk merelokasikan tahap kedua yang sekitar 104 belum, 152 sudah dibangun oleh Kementerian PUPR, jika sudah di serahkan ke Pemerintah Papua, dapat dikelola secara baik, dan pedagang dapat mengisi los yang tersedia di pasar. Total los yang mau direlokasi tahap pertama ini 304 los. Tahap kedua 152 los. Total 457 los.”¹⁸

Beliau juga menyampaikan bahwa agenda pembangunan Pasar Skouw kedepannya terkait rancangan-rancangan pembangunan pasar terkait struktur organisasinya, Unit

¹⁸H. Bleskadit, *Kepala Bid. Perdagangan Luar Negeri*, diwawancarai oleh Kristien Chena Maryen, Kantor Dinas Perdagangan & Perindustrian Provinsi Papua, 2020.

Pelaksanaan Teknis (UPT) dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua agar ditahun tahun mendatang UPT menjadi kontribusi parkir, manajemen pengelolaan, *Money Changer* Resmi. Agar tidak lagi transaksi uang Kina dan Uang Rupiah di lakukan oleh setiap pedagang tetapi memiliki tempat legal yang resmi untuk menukar uang di kawasan perbatasan RI dan PNG.

2.3.2 Potensi Pasar Skouw Bagi *Indigenous People*

Pembangunan pada suatu wilayah diharapkan menjalin kerjasama dengan warga setempat sebagai pelaksana dan pemanfaatan. Sebab pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional. Ada lima manfaat yang bisa diperoleh negara atas kelangsungan pembangunan infrastruktur menurut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo.

Pertama ialah mewujudkan biaya angkut logistik yang lebih kompetitif. Kedua, peningkatan daya saing investasi. Tingginya biaya logistik di Indonesia turut mengurangi daya saing investasi dalam negeri, bahkan di lingkup Asia Tenggara. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur demi daya saing investasi. Ketiga, penciptaan lapangan pekerjaan, dimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata diseluruh penjuru nusantara,

dianggap efektif untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Keempat, penciptaan pusat kawasan ekonomi baru. Melalui pembangunan infrastruktur dapat membuka akses baru juga mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tertentu. Terakhir, meningkatkan pelayanan publik. Sebab infrastruktur merupakan bagian penting dari pelayanan terhadap publik oleh negara. Alhasil pemerintah terus berkomitmen untuk memperluas manfaat infrastruktur terhadap warganya.¹⁹

Pembangunan yang terjadi di wilayah perbatasan negara Indonesia dan Papua New Guinea memberikan dampak bagi masyarakat asli (*Indigenous People*). Masyarakat asli mencakup warga masyarakat adat suku Skouw (RI) dan warga masyarakat adat suku Wutung (PNG). Kedua suku adat yang tinggal saling berdampingan pada wilayah perbatasan khususnya masyarakat asli suku Skouw yang menjadi penduduk di wilayah batas negara Indonesia, tentu dengan hadirnya sebuah pembangunan rancangan pemerintah pada wilayah terbelakang negara Indonesia ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat asli.

Sebagaimana pembangunan yang terus meningkat di wilayah perbatasan, salah satunya pembangunan pasar Skouw.

Pada 2.3.1 Sejarah Pasar, penulis telah menjelaskan secara detail,

¹⁹ Liputan6.com, 'Ini 5 Manfaat Pembangunan Infrastruktur di Masa Pandemi Corona', *Liputan6.com*, 2020, <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4357736/ini-5-manfaat-pembangunan-infrastruktur-di-masa-pandemi-corona>> diakses tanggal 19 Oktober 2020.

awal mula berdirinya pasar skouw hingga saat ini dipersiapkan menjadi Pasar Wisata Skouw. Hal ini menyimpulkan betapa besarnya potensi wilayah perbatasan menjadi sentra ekonomi. Pasar Skouw memberikan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat khususnya penduduk asli Papua yang tinggal di wilayah perbatasan.

Berikut beberapa potensi pasar skouw yang penulis kategorikan :

1. Memberikan lapangan pekerjaan.
2. Meningkatkan pariwisata wilayah perbatasan Indonesia & PNG.
3. Meningkatkan devisa negara.
4. Mendorong menciptakan pengembangan wilayah perbatasan.
5. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi pada pasar Skouw yang berpeluang usaha.
6. Keuntungan finansial karena konsumen utama adalah warga negara tetangga, PNG.
7. Pasar Skouw yang dicanangkan menjadi Pasar Wisata akan mengundang banyak wisatawan lokal maupun asing.

Pasar Skouw yang cenderung diminati oleh warga negara PNG akan menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat lokal karena memiliki beberapa fasilitas yang didukung menunjang

Pasar Wisata Skouw, antara lain ; masjid, gereja, kolam berenang, *amphitheater*, dan berbagai sudut pasar yang menarik dijadikan spot foto.

Oleh karena potensi yang dimiliki pasar Skouw, penduduk asli perlu terlibat agar merasakan manfaat dari adanya pembangunan pada daerah tempat mereka tinggal. Perempuan Papua sebagai *indigenous women* turut menunjukkan peranan dalam berpartisipasi pada pasar Skouw, peran perempuan Papua yakni dengan ikut terlibat menjadi pedagang pada pasar Skouw, meski sederhana hanya menjual hasil-hasil kebun, tetapi mereka menunjukkan peranan pada pasar Skouw.

Namun jumlah perempuan Papua sangat minim dibandingkan dengan pedagang non Papua, hal inilah yang kemudian menjadi kendala mengapa perempuan Papua menjadi minoritas pada daerahnya sendiri. Melihat kondisi pasar Skouw yang terus dikembangkan, memberikan alasan untuk masyarakat asli turut berpartisipasi karena pasar memiliki potensi untuk membuka usaha.

Pemanfaatan kearifan lokal merupakan salah pilihan bagi masyarakat asli dalam meningkatkan kreatifitas dalam memanfaatkan lokasi perbatasan sebagai tempat wisata yang dapat menjadi ciri khas dan dapat dipamerkan atau di jual di pasar

nantinya. Tidak hanya itu, masyarakat asli atau dalam hal ini perempuan Papua, penting untuk perempuan Papua menunjukkan kemampuan yang dimiliki, agar ketika wisatawan yang berkunjung dapat melihat gambaran budaya Papua melalui objek wisata perbatasan negara Indonesia & PNG di Skouw.

Potensi pasar Skouw pada perbatasan Indonesia & PNG akan tercipta ketika masyarakat asli juga antusias mengambil bagian pada pengelolaan perbatasan, dan menciptakan suatu kearifan lokal yang dapat memberikan ciri khas dan menjadi *icon* pada pasar Skouw.